JURNAL ILMU EKONOMI (JIE)
Vol. 5 No. 1, April 2025
https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie
E-ISSN : 2985-4652

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KOTA BANDAR LAMPUNG (2020-2024)

Raditya Aldiansyah[1], Erlin Kurniati[2]

[1] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
[2] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bandar Lampung Dalam kurun waktu 2020–2024, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif-asosiatif. Sumber yang digunakan berupa Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari sumber yang telah tersedia sebelumnya. dalam bentuk rangkaian data tahunan dari waktu ke waktu periode 2020–2024 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran pemerintah kota bandar lampung serta publikasi oleh (BPS) Kota Bandar Lampung. Cara ini menggunkan sumber regresi linear dengan memanfaatkan aplikasi EViews untuk melakukan regresi linear berganda, dan juga dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi.
Secara parsial, variabel PAD memiliki angka yang signifikansi sebesar 0,5908 yang menandakan bahwa variabel tersebut tidak mempengaruhi IPM. Demikian pula, variabel Belanja Modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,6637 yang juga mengindikasikan tidak adanya pengaruh tidak memberikan dampak berarti terhadap IPM Secara simultan, PAD dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, sebagaimana hal ini dapat dilihat dari nilai Prob(F-statistic) sebesar) sebesar 0,823153, angka koofisiens determinasi (R^2) sebesar 0,176847 mengindikasikan bahwa PAD dan Belanja Modal hanya mampu menjelaskan sebesar 17,68% variasi IPM, dan dengan angka terakhir 82,32% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas serta tidak mengalami masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi.

Kata Kunci: PAD, Belanja Modal, IPM, regresi, Bandar Lampung

RIWAYAT ARTIKEL
Tersedia *Online*: 25-04-2026

KORESPONDENSI:
Nama : Raditya Aldiansyah
E-mail: raditaldi29@gmail.com

DOI:
https://doi.org/10.59827/jie.v5i1.451
PENERBIT:
Laboratorium Riset Ekonomi

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah pada Pembangunan pada hakikatnya tidak semata-mata ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan juga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam konteks tersebut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator krusial yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan, yang ditinjau dari tiga aspek pokok, yakni harapan hidup yang mencerminkan kesehatan, tingkat pendidikan, serta kualitas standar kehidupan masyarakat. Dengan demikian, tinggi-rendahnya IPM dapat digunakan untuk melihat sejauh mana hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya digambarkan dalam angka ekonomi makro.(Badan Pusat Statistik, 2015)

Kota Bandar Lampung, yang merupakan ibu kota Provinsi Lampung, menempati posisi yang strategis karena berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, perekonomian, pendidikan, serta pelayanan jasa. sehingga kualitas pembangunan manusianya menjadi sangat penting bagi perkembangan wilayah secara keseluruhan.(PPID Kota Bandar Lampung, n.d.) (Badan Pusat Statistik kota Bandar Lampung, 2024a), Dari BPS Data tersebut memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandar Lampung mengalami kecenderungan meningkat, yakni dari 77,44 pada tahun 2020 menjadi 79,86 pada tahun 2023, kemudian bertambah lagi menjadi 80,46 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam capaian pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung. Meskipun demikian, perkembangan tersebut masih perlu dianalisis secara lebih mendalam, khususnya terkait faktor-faktor fiskal yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut, terutama yang berkaitan dengan kapasitas keuangan daerah serta efektivitas kualitas belanja pemerintah daerah. (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2024a) (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2023) (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2020).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pembangunan manusia. Keberadaan PAD menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah, sebab sumber penerimaannya berasal dari potensi ekonomi lokal, antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, (Pemerintah Republik Indonesia, 2019)(Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020). Semakin tinggi angka PAD yang mampu dihimpun

pemerintah daerah, dan juga semakin besar pula ruang fiskal yang dapat digunakan untuk membiayai pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan IPM. Di Kota Bandar Lampung, laporan realisasi anggaran menunjukkan bahwa realisasi PAD tahun 2024 mencapai Rp716,59 miliar , meningkat dibandingkan Rp694,68 miliar pada tahun 2023 . Kondisi ini menunjukkan adanya potensi penguatan kapasitas fiskal daerah yang relevan untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan pembangunan manusia.(Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020) (Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2024)

Selain PAD, variabel lain yang diduga mempengaruhi IPM adalah modal belanja . Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, modal belanja diarahkan Untuk memperoleh atau meningkatkan kepemilikan aset tetap yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode anggaran, misalnya melalui kegiatan pembangunan. gedung, jalan, jaringan, irigasi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan sarana umum pendidikan lainnya.(Pemerintah Republik Indonesia, 2019), Secara konseptual, modal belanja sangat penting karena menjadi instrumen pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan dasar dan infrastruktur yang mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas ekonomi. Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa realisasi belanja modal tahun 2024 sebesar Rp353,60 miliar , naik dari Rp322,69 miliar pada tahun 2023 .(Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2024),Peningkatan ini menarik untuk dikaji karena secara teoritis peningkatan belanja modal seharusnya mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mendorong peningkatan IPM.(Pemerintah Kota Bandar Lampung, 2024)

Hubungan antara PAD, modal belanja, dan IPM juga telah banyak dibahas dalam penelitian terdahulu, meskipun hasilnya belum selalu konsisten. Penelitian Edi Yanto, Ridwan, dan Vitayanti Fattah menemukan bahwa PAD dan modal belanja berpengaruh terhadap IPM pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.(Yanto et al., n.d.) Penelitian Setiawan dan Budiana menunjukkan bahwa modal belanja dapat mempengaruhi IPM melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di Provinsi Bali.(Setiawan & Budiana, 2015), Sementara itu, penelitian Sulaeman dan Silvia menegaskan bahwa PAD, transfer daerah, dan modal belanja memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi regional, yang secara tidak langsung juga berhubungan dengan kualitas pembangunan manusia.(Sulaeman & Silvia, 2019) Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa

variabel fiskal daerah memang relevan untuk menjelaskan perubahan IPM, namun karakteristik setiap daerah dapat menghasilkan pengaruh yang berbeda.

Di sisi lain, modal belanja tidak selalu otomatis meningkatkan kualitas pembangunan manusia apabila alokasinya belum efektif, kurang tepat sasaran, atau lebih banyak terserap pada aset yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melihat bukan hanya besar kecilnya anggaran, tetapi juga bagaimana kemampuan fiskal daerah melalui PAD diterjemahkan ke dalam kebijakan belanja yang produktif.(Juniawan & Suryantini, n.d.) (Sulaeman & Silvia, 2019), Dalam konteks Bandar Lampung, isu ini menjadi semakin penting karena periode 2020–2024 merupakan masa transisi dari tekanan pandemi menuju pemulihan ekonomi dan sosial, sehingga kebijakan fiskal daerah pada periode ini sangat mungkin memiliki pengaruh yang kuat terhadap perubahan IPM.(Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2024b)

Dengan demikian, studi tentang dampak Penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bandar Lampung pada periode 2020–2024 penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana kapasitas fiskal daerah serta alokasi belanja investasi pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020) (Juniawan & Suryantini, n.d.)

Tabel 1 perkembangan PAD, Belanja Modal (BM), dan IPM Kota Bandar Lampung tahun 2020–2024

TAHUN	PAD	BM	IPM
2020	1,130.71	2927.14	78.78
2021	991.58	2409.65	78.93
2022	800	2254.7	79.33
2023	800	2364.85	79.89
2024	1,030.45	2690.12	80.46

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat perkembangan PAD, Belanja Modal (BM), dan IPM Kota Bandar Lampung tahun 2020–2024 menunjukkan pola yang menarik. PAD tercatat sebesar 1.130,71 pada 2020, turun menjadi 991,58 pada 2021 dan 800 pada 2022–2023, lalu meningkat kembali menjadi 1.030,45 pada 2024. Pada saat yang sama, BM juga mengalami fluktuasi dari 2.927,14 pada 2020 menjadi 2.409,65 pada 2021, turun lagi menjadi 2.254,70 pada 2022, lalu naik menjadi 2.364,85 pada 2023 dan 2.690,12 pada 2024. Sebaliknya, IPM justru menunjukkan kecenderungan meningkat terus dari 78,78 pada 2020 menjadi 80,46 pada 2024. Pola ini memperlihatkan bahwa meskipun kapasitas fiskal dan belanja investasi daerah berfluktuasi, kualitas pembangunan manusia tetap mengalami perbaikan secara bertahap, sehingga hubungan di antara ketiga variabel tersebut penting untuk diuji lebih mendalam. (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung, 2024a)

Secara konseptual, IPM adalah indikator yang menilai keberhasilan pembangunan manusia dari aspek kondisi hidup yang sehat, pendidikan tingkat pengetahuan dan pembelajaran tingkat kesejahteraan hidup yang memadai. Karena itu, perubahan IPM tidak semata-mata dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan juga oleh faktor-faktor lainnya. Kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif. dan berkelanjutan. Dalam konteks Bandar Lampung, data resmi BPS menunjukkan bahwa IPM 2024 mencapai 80,46, sehingga kota ini berada pada kategori pembangunan manusia tinggi. Kondisi tersebut memperkuat argumen bahwa peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu dilihat dalam kaitannya dengan sumber pembiayaan daerah dan struktur belanja pemerintah. (badan pusat statistik kota Bandar Lampung, 2024a)

Di sisi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian keuangan daerah, karena berasal dari potensi ekonomi setempat yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, PAD menempati posisi yang strategis sebagai komponen penting dalam struktur pendapatan daerah. memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membiayai program prioritas tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Oleh sebab itu, semakin besar PAD, semakin luas pula peluang pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan program sosial

yang berkontribusi pada peningkatan IPM.(Pemerintah Republik Indonesia, 2019)(Pemerintah Republik Indonesia, 2020)

Sementara itu, Belanja modal merupakan pengeluaran dalam anggaran yang dialokasikan untuk perolehan aset tetap serta aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. seperti jalan, gedung, jaringan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Secara teoritis, belanja modal yang produktif akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan mendorong kualitas hidup yang lebih baik. Namun, data yang terlampirkan menunjukkan bahwa penurunan BM pada 2021–2022 tidak diikuti penurunan IPM; justru IPM tetap naik. Temuan deskriptif ini mengindikasikan bahwa pengaruh belanja modal terhadap IPM kemungkinan tidak selalu bersifat langsung, melainkan dapat bekerja melalui kualitas alokasi, efektivitas program, atau adanya efek jeda waktu kebijakan fiskal.(Yanto et al., n.d.) (Setiawan & Budiana, 2015)

Sejumlah penelitian sebelumnya mendukung pentingnya variabel fiskal daerah dalam menjelaskan pembangunan manusia. Penelitian Yanto, Ridwan, dan Fattah menunjukkan bahwa PAD dan belanja modal berpengaruh terhadap IPM pada kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Penelitian Setiawan dan Budiana juga menemukan bahwa belanja modal berpengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel perantara. Di samping itu, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa PAD juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pengalokasian belanja modal, meskipun besarnya pengaruh dapat berbeda antarwilayah. Hal ini menunjukkan bahwa hasil hubungan PAD, BM, dan IPM sangat kontekstual, sehingga penelitian khusus pada Kota Bandar Lampung tetap relevan dilakukan.(Mirza, 2012)(Universitas Pendidikan Ganesha, n.d.-b)

Jika dikaitkan dengan data diatas, terdapat indikasi bahwa kenaikan IPM Bandar Lampung selama 2020–2024 tidak selalu bergerak searah secara langsung dengan fluktuasi PAD dan BM. Pada satu sisi, hal ini dapat menunjukkan bahwa program pembangunan manusia bersifat relatif terjaga walaupun terjadi tekanan fiskal. Pada sisi lain, hal tersebut juga dapat menandakan bahwa peningkatan IPM dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor, seperti efektivitas belanja pemerintah, struktur prioritas pembangunan, dan kesinambungan pelayanan publik. Dengan demikian, Penelitian ini

memiliki urgensi untuk menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bandar Lampung, baik secara individual maupun simulta.(Universitas Pendidikan Ganesha, n.d.-a) (Maulani et al., n.d.) (Universitas Pendidikan Ganesha, n.d.-b)

TELAAH LITERATUR

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Dalam kajian akademik, IPM sering dimanfaatkan sebagai alat untuk menggambarkan kualitas hidup masyarakat secara lebih menyeluruh, karena tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan manusia. dipandang penting karena memperluas ukuran pembangunan dari yang semula hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran kesejahteraan yang lebih substantif. Sagar dan Najam menekankan bahwa keunggulan IPM terletak pada kemampuannya menggeser fokus pembangunan dari sekadar output ekonomi menuju kualitas hidup manusia, walaupun tetap memiliki keterbatasan konseptual dalam pengukurannya.(Sagar & Najam, 1998)

Dalam konteks penelitian ini, IPM layak dijadikan variabel dependen karena perubahan nilainya mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berdampak pada manusia. Literatur terbaru juga menunjukkan bahwa pengeluaran publik, khususnya pada sektor sosial, berkaitan erat dengan peningkatan capaian pembangunan manusia maupun penurunan kehilangan pembangunan akibat ketimpangan. Dengan demikian, IPM bukan hanya hasil akhir pembangunan, tetapi juga cerminan efektivitas kebijakan fiskal daerah.(Miranda-Lescano et al., 2024)

Secara teoritis, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Walaupun banyak artikel internasional menggunakan istilah *fiscal decentralization* ketimbang PAD secara spesifik, substansinya sejalan, yaitu bahwa semakin besar ruang fiskal yang dikuasai pemerintah subnasional,

semakin besar pula kapasitas mereka untuk membiayai kebutuhan lokal secara responsif. Studi lintas negara oleh Jin dan Jakovljevic menemukan adanya hubungan berbentuk *hump-shaped* antara desentralisasi fiskal dan HDI, yang berarti penguatan fiskal daerah dapat mendukung pembangunan manusia, tetapi efeknya tidak selalu linear.(Jin & Jakovljevic, 2023)

Untuk konteks Indonesia, Susilo dkk. menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berhubungan dengan konvergensi IPM antardaerah di 34 provinsi Indonesia. Temuan ini penting bagi penelitian Bandar Lampung karena memberi dasar bahwa kapasitas fiskal daerah, yang dalam praktik pemerintahan daerah salah satunya tercermin pada PAD, dapat menjadi faktor yang relevan dalam menjelaskan perubahan IPM. Namun, studi tersebut juga menyiratkan bahwa pengaruh fiskal bekerja dalam kerangka kelembagaan dan tata kelola, bukan sekadar lewat besarnya pendapatan.(Susilo et al., 2025)

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu periode, seperti jalan, gedung sekolah, puskesmas, jaringan air, dan infrastruktur publik lainnya. Dalam perspektif pembangunan manusia, belanja modal penting karena memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar. Masduki, Rindayati, dan Mulatsih menegaskan bahwa kualitas belanja daerah berhubungan dengan penurunan kemiskinan sekaligus peningkatan IPM, sehingga bukan hanya besar anggarannya yang penting, tetapi juga mutu alokasinya.(Masduki et al., 2022)

Temuan serupa juga terlihat pada artikel Karpi dkk. yang menilai kebijakan pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan IPM. Artikel itu menekankan bahwa efektivitas komposisi belanja daerah sangat menentukan hasil pembangunan manusia. Artinya, peningkatan belanja belum tentu otomatis menaikkan IPM bila struktur pengeluarannya tidak mendukung pelayanan publik dan infrastruktur yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.(Karpi et al., 2022)

Literatur internasional memberi dukungan kuat bahwa pengeluaran publik, terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, berpengaruh terhadap pembangunan manusia. Roca-Sagalés dan Muinelo-Gallo menemukan bahwa belanja kesehatan pemerintah pusat maupun subnasional berdampak positif terhadap HDI dan komponennya, sedangkan dampak belanja pendidikan lebih jelas pada dimensi pendidikan itu sendiri. Ini berarti belanja pemerintah dapat memengaruhi IPM secara

langsung maupun melalui dimensi tertentu yang membentuk IPM.(Roca-Sagalés & Muinelo-Gallo, 2023)

Miranda-Lescano, Muinelo-Gallo, dan Roca-Sagalés juga menunjukkan bahwa belanja sosial publik berkaitan dengan penurunan *losses* pada pembangunan manusia yang disebabkan ketimpangan. Hasil ini penting untuk penelitian Anda karena memberi dasar bahwa belanja pemerintah tidak hanya relevan terhadap rata-rata kualitas manusia, tetapi juga terhadap distribusi manfaat pembangunan. Dalam konteks Bandar Lampung, hal ini menguatkan dugaan bahwa belanja modal dan kapasitas fiskal daerah dapat memengaruhi IPM bila diarahkan secara efektif dan inklusif.(Miranda-Lescano et al., 2024)

Meski banyak studi menunjukkan hubungan positif, hasil empiris tidak selalu seragam. Onabote, Ohwofasa, dan Ogunjumo pada kasus Nigeria menemukan bahwa pengeluaran sektoral pemerintah tidak menunjukkan hubungan yang kuat dengan pembangunan manusia dalam jangka pendek maupun panjang pada model utama mereka, walaupun terdapat indikasi efek jangka panjang pada estimasi koreksi kesalahan. Temuan seperti ini menandakan bahwa besarnya belanja saja tidak cukup; kualitas tata kelola, efisiensi, dan arah prioritas sangat menentukan.(Onabote et al., 2023)

Purohit juga menunjukkan bahwa pengeluaran anggaran di bidang kesehatan dan pembangunan manusia sangat dipengaruhi oleh disparitas antardaerah serta ketimpangan akses layanan. Temuan ini relevan untuk menjelaskan bahwa belanja modal tidak selalu segera terlihat dampaknya pada IPM, terutama bila daerah menghadapi perbedaan kualitas layanan dan distribusi infrastruktur. Karena itu, analisis pengaruh PAD dan belanja modal terhadap IPM di Bandar Lampung perlu dilakukan secara empiris, bukan diasumsikan otomatis positif.(Purohit, 2012)

Berdasarkan literatur di atas, terdapat tiga pola utama. Pertama, kapasitas fiskal daerah atau desentralisasi fiskal cenderung terkait dengan pembangunan manusia. Kedua, belanja publik yang berkualitas, terutama belanja sosial dan belanja investasi publik, cenderung mendukung peningkatan IPM. Ketiga, hasil empiris dapat berbeda antarwilayah karena dipengaruhi efektivitas kebijakan, kualitas institusi, dan struktur pengeluaran. Dengan demikian, penelitian tentang pengaruh PAD dan belanja modal terhadap IPM di Kota Bandar Lampung tahun 2020–2024 memiliki dasar teoritis dan empiris yang kuat, sekaligus mengisi kebutuhan studi yang lebih spesifik pada level kota.(Mukherjee & Badola, 2021) (Karpi et al., 2022)

Penelitian Jin dan Jakovljevic (2023) menganalisis hubungan antara fiscal decentralization dan Human Development Index pada 50 negara selama 1991–2020. Hasilnya menunjukkan adanya hubungan nonlinier berbentuk hump-shaped, yang berarti peningkatan desentralisasi fiskal pada tahap tertentu dapat mendorong pembangunan manusia, tetapi efeknya tidak selalu terus meningkat secara proporsional. Temuan ini penting bagi penelitian Anda karena menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah seperti PAD berpotensi meningkatkan kualitas pembangunan manusia, namun pengaruhnya sangat bergantung pada efektivitas pengelolaannya.(Jin & Jakovljevic, 2023)

Penelitian Susilo, Prasetyia, Wicesa, dan Finuliyah pada 34 provinsi di Indonesia periode 2011–2020 menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap konvergensi IPM antarprovinsi. Dengan menggunakan pendekatan Arellano–Bond GMM dynamic panel, studi ini menunjukkan adanya proses konvergensi IPM di Indonesia dan bahwa kebijakan fiskal daerah merupakan salah satu instrumen yang berkaitan dengan pemerataan kualitas pembangunan manusia. Studi ini relevan sebagai landasan bahwa variabel fiskal daerah dapat dipakai untuk menjelaskan variasi IPM dalam konteks Indonesia.(Susilo et al., 2025)

Penelitian Masduki, Rindayati, dan Mulatsih (2022) membahas kualitas belanja daerah dan kaitannya dengan kemiskinan serta IPM di wilayah tertinggal di Pulau Jawa. Artikel ini menegaskan bahwa bukan hanya besarnya belanja pemerintah yang penting, tetapi juga kualitas dan komposisi belanja. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kualitas pengeluaran daerah berkaitan dengan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM. Temuan ini sangat relevan untuk variabel belanja modal, karena menunjukkan bahwa pengaruh belanja terhadap IPM bergantung pada seberapa tepat dan produktif alokasi anggaran tersebut.(Masduki et al., 2022)

Penelitian Karpi, Widayat, Ratnasari, dan Munajat (2022) menelaah apakah kebijakan pengelolaan belanja daerah dapat meningkatkan IPM. Hasil kajian mereka menunjukkan bahwa manajemen belanja daerah merupakan faktor penting dalam mendorong hasil pembangunan manusia. Dengan kata lain, peningkatan anggaran tidak otomatis memperbaiki IPM apabila pengelolaannya tidak efisien atau tidak diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini mendukung asumsi bahwa belanja modal baru akan efektif meningkatkan IPM bila dikelola secara tepat sasaran.(Karpi et al., 2022)

Penelitian Roca-Sagalés dan Muinelo-Gallo (2023) menunjukkan bahwa pengeluaran kesehatan publik, baik di level pusat maupun subnasional, berpengaruh positif terhadap human development dan komponen-komponennya. Studi ini penting karena memperlihatkan bahwa belanja pemerintah dapat berdampak langsung pada dimensi pembentuk IPM, terutama melalui layanan dasar. Relevansinya bagi penelitian Anda adalah bahwa belanja modal daerah yang diarahkan pada infrastruktur kesehatan dan layanan publik dapat menjadi mekanisme penting dalam peningkatan IPM Kota Bandar Lampung.(5) Berdasarkan studi lain oleh Miranda-Lescano, Muinelo-Gallo, dan Roca-Sagalés (2024), belanja sosial publik juga berkaitan dengan penurunan kehilangan pembangunan manusia akibat ketimpangan, sehingga menguatkan argumen bahwa efektivitas belanja publik sangat menentukan kualitas pembangunan manusia.(Roca-Sagalés & Muinelo-Gallo, 2023)

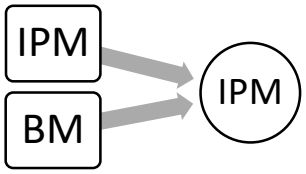
Di sisi lain, hasil penelitian tidak selalu seragam. Onabote, Ohwofasa, dan Ogunjumo (2023) pada kasus Nigeria menemukan bahwa government sectoral spending tidak selalu menunjukkan hubungan yang kuat dengan pembangunan manusia dalam seluruh model estimasi, walaupun terdapat indikasi pengaruh dalam horizon tertentu. Temuan ini menegaskan bahwa hubungan antara belanja pemerintah dan IPM dipengaruhi oleh banyak faktor lain, seperti tata kelola, efisiensi, dan prioritas sektor. Bagi penelitian Anda, hal ini penting karena berarti pengaruh PAD dan belanja modal terhadap IPM Bandar Lampung perlu dibuktikan secara empiris, bukan hanya diasumsikan positif.(7) Sementara itu, artikel Purohit (2012) juga memperlihatkan bahwa pengeluaran pembangunan manusia, khususnya bidang kesehatan, sangat dipengaruhi oleh disparitas wilayah dan kualitas distribusi layanan, sehingga dampaknya terhadap pembangunan manusia dapat berbeda antarwilayah.(Onabote et al., 2023)

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu memperlihatkan tiga pola besar. Pertama, kapasitas fiskal/desentralisasi fiskal cenderung berkaitan dengan peningkatan pembangunan manusia. Kedua, kualitas belanja daerah, termasuk belanja yang diarahkan pada layanan publik dan investasi sosial, cenderung berhubungan positif dengan IPM. Ketiga, hasil hubungan tersebut tidak selalu konsisten karena dipengaruhi efektivitas kebijakan, struktur pengeluaran, serta kondisi sosial-ekonomi masing-masing daerah. Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh PAD dan belanja modal terhadap IPM di Kota Bandar Lampung tahun 2020–2024 memiliki posisi yang jelas, yaitu menguji

hubungan tersebut dalam konteks kota yang menunjukkan tren IPM meningkat di tengah fluktuasi fiskal daerah.

Dari penjelasan diatas dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kajian yang dilakukan ini termasuk dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipergunakan oleh karena data yang diolah berupa angka-angka serta diarahkan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Adapun pendekatan asosiatif dipergunakan karena studi ini menitikberatkan pada keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bandar Lampung.

Studi ini juga menerapkan pendekatan deskriptif-verifikatif, Deskriptif diartikan sebagai upaya penelitian untuk menggambarkan perkembangan PAD, Belanja Modal, dan IPM Kota Bandar Lampung selama periode 2020–2024. Verifikatif berarti penelitian menguji Secara empiris, perlu dikaji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Penetapan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota provinsi memiliki kedudukan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan perekonomian, sektor pendidikan, serta pelayanan publik di wilayah Provinsi Lampung.Waktu penelitian menggunakan data periode 2020–2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa

rentang tersebut mencerminkan kondisi fiskal daerah dan pembangunan manusia pada masa pascapandemi hingga periode pemulihan ekonomi daerah.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, populasi merupakan keseluruhan objek atau unit analisis yang menjadi fokus penelitian. Populasi pada penelitian ini mencakup seluruh data keuangan daerah serta data pembangunan manusia yang berkaitan dengan Kota Bandar Lampung.

Adapun sampel penelitian ini berupa data tahunan yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung periode 2020–2024
2. Belanja Modal Kota Bandar Lampung periode 2020–2024
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandar Lampung periode 2020–2024

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh atau sensus, yaitu seluruh data yang tersedia pada periode penelitian digunakan sebagai sampel.

Sumber Data dan Jenis Data

Data yang digunakan disini berupa data sekunder dalam bentuk deret waktu tahunan selama kurun 2020–2024. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti, melainkan bersumber dari dokumen, laporan resmi, serta publikasi lembaga yang berwenang. Adapun data yang digunakan mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandar Lampung. Data PAD dan Belanja Modal diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung, sedangkan data IPM bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung. Pemanfaatan data sekunder dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang diperlukan telah tersedia secara resmi, memiliki ukuran yang jelas, serta relevan untuk mengkaji pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap IPM Kota Bandar Lampung selama periode penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan variabel independen pertama dalam penelitian ini yang dinyatakan dengan simbol X1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

merupakan semua pemasukan yang diperoleh daerah dari potensi dan sumber daya yang dimiliki sendiri, yang pemungutannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, PAD diukur berdasarkan total realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung setiap tahun selama periode 2020–2024 dengan satuan rupiah. Data PAD diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung. Variabel ini diukur menggunakan skala rasio, karena mempunyai nilai nol mutlak dan memungkinkan dilakukan perbandingan secara proporsional.

Belanja Modal merupakan variabel independen kedua yang dilambangkan dengan simbol X2. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap maupun aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti pembangunan gedung, jalan, jaringan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta berbagai infrastruktur publik lainnya. Dalam penelitian ini, Belanja Modal diukur berdasarkan total realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung setiap tahun selama periode 2020-2024, yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Data mengenai Belanja Modal juga bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandar Lampung. Adapun skala pengukuran yang digunakan untuk variabel ini adalah skala rasio.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan variabel terikat yang dinyatakan dengan simbol Y. IPM adalah indikator gabungan yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian pembangunan manusia berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak. Dalam penelitian ini, IPM diukur melalui nilai IPM Kota Bandar Lampung setiap tahun selama periode 2020–2024 berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS. Skala pengukuran berupa skala rasio, karena nilai IPM berbentuk angka kuantitatif yang dapat dibandingkan antarperiode.

Untuk mempermudah analisis dan mengurangi perbedaan skala yang terlalu besar antara variabel keuangan dan variabel indeks, maka variabel PAD dan Belanja Modal dapat ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln). Dengan demikian, dalam analisis statistik variabel tersebut dapat ditulis sebagai LnPAD dan LnBM, sedangkan variabel IPM tetap menggunakan nilai aslinya. Transformasi ini bertujuan agar data lebih stabil, mengurangi kemungkinan heterogenitas varians, serta mempermudah interpretasi hubungan antarvariabel dalam model regresi.

Metode Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan masing-masing variabel penelitian, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandar Lampung selama periode 2020–2024. Analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel, uraian, dan perbandingan antarperiode, sehingga dapat diketahui kecenderungan naik atau turunnya setiap variabel selama masa penelitian.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda diterapkan untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel keterikatan. Pada penelitian ini, variabel bebas yang dipakai meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal, sedangkan variabel tujuan yang diteliti adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Model rumus persamaan regresi linier berganda yang diterapkan dalam studi ini diformulasikan sebagai berikut.

[Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e]

Keterangan:

(Y) = Indeks Pembangunan Manusia

(a) = konstanta

b_1= koefisien regresi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah

b_2= koefisien regresi untuk variabel Belanja Modal

X_1= variabel Pendapatan Asli Daerah

X_2= variabel Belanja Modal

e= komponen galat atau kesalahan pengganggu

Jika diperlukan, variabel PAD dan Belanja Modal dapat ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural agar data lebih stabil dan mudah dianalisis.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melaksanakan analisis regresi, penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik dengan tujuan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan asumsi statistik. Uji asumsi klasik yang dilakukan

mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai apakah residual pada model regresi berdistribusi normal. Model regresi yang baik umumnya ditandai oleh residual yang menyebar secara normal. Pengujian normalitas tersebut dapat dilakukan melalui uji statistik maupun melalui analisis grafik, seperti normal probability plot

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung masalah multikolinearitas. Pengujian ini umumnya dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance berada di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas..

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi apakah model regresi mengalami ketidakseragaman varian sisa antar pengamatan . Model regresi yang ideal harus bebas dari heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan mengamati pola pada plot/ sisa grafis scatterplot atau menggunakan uji statistik tertentu.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya. Dalam penelitian yang menggunakan data time series, pengujian autokorelasi perlu dilakukan karena model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung autokorelasi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji hal tersebut adalah uji Durbin-Watson.

Uji t (Parsial)

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara residual pada suatu periode dan residual pada periode sebelumnya. Karena penelitian ini menggunakan data deret waktu, pengujian autokorelasi perlu dilakukan. Model

regresi yang baik adalah model yang tidak menunjukkan adanya autokorelasi. Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

Sementara itu, uji t digunakan untuk mengevaluasi pengaruh setiap variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Dalam konteks penelitian ini, uji t bertujuan untuk mengkaji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta untuk mengetahui apakah Belanja Modal secara terpisah juga berdampak pada IPM. Penentuan hasil dilakukan dengan melihat nilai signifikansi yang kemudian dibandingkan dengan batas signifikansi sebesar 0,05.

Uji F (Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Tujuannya adalah menilai apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal secara bersama-sama memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bandar Lampung. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel bebas tersebut secara kolektif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

Koefisien determinasi (R^2) memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1 dan digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi data. Semakin tinggi nilai R^2, semakin besar proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan demikian, R^2 mencerminkan seberapa kuat PAD dan Belanja Modal dalam menjelaskan perubahan pada IPM Kota Bandar Lampung.

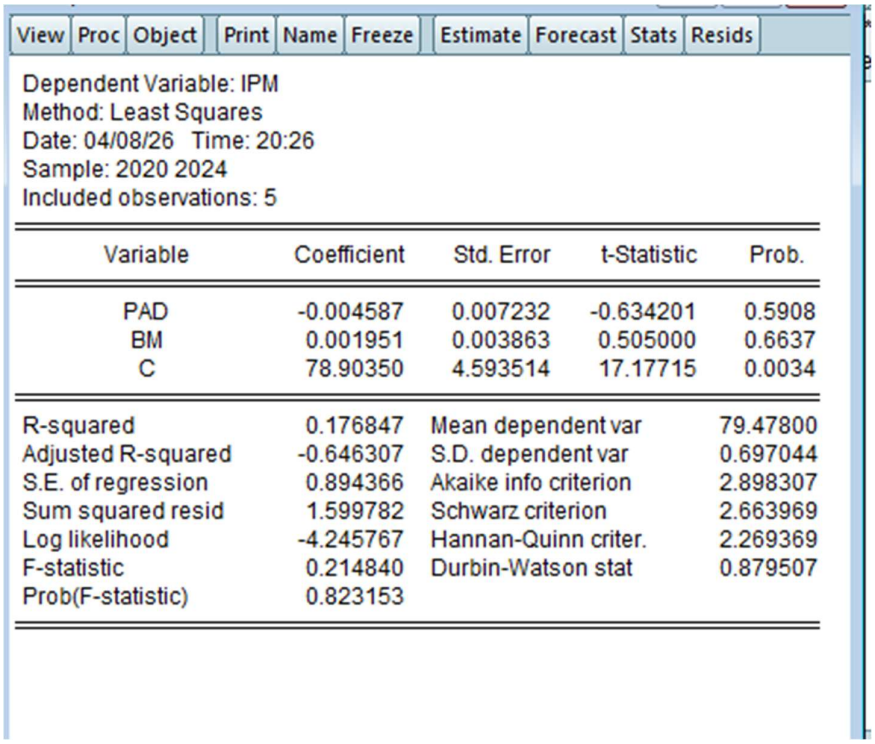
Alat Analisis Data

Data pada penelitian ini diolah menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS, EViews, atau Microsoft Excel. Penggunaan software statistik bertujuan untuk mempermudah proses pengolahan data, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bedasarkan hasil estimasi menggunakan regresi linear berganda maka dapat dibuat dengan persamaan seperti berikut :

Gambar 2 Hasil Regresi



View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Estimate | Forecast | Stats | Resids

Dependent Variable: IPM
Method: Least Squares
Date: 04/08/26 Time: 20:26
Sample: 2020 2024
Included observations: 5

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAD	-0.004587	0.007232	-0.634201	0.5908
BM	0.001951	0.003863	0.505000	0.6637
C	78.90350	4.593514	17.17715	0.0034

R-squared	0.176847	Mean dependent var	79.47800
Adjusted R-squared	-0.646307	S.D. dependent var	0.697044
S.E. of regression	0.894366	Akaike info criterion	2.898307
Sum squared resid	1.599782	Schwarz criterion	2.663969
Log likelihood	-4.245767	Hannan-Quinn criter.	2.269369
F-statistic	0.214840	Durbin-Watson stat	0.879507
Prob(F-statistic)	0.823153		

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Least Squares, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

IPMt = 78.90350 - 0.004587 PADt + 0.001951 BMt + et

IPM merupakan Indeks Pembangunan Manusia.

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah.

BM merujuk pada Belanja Modal.

e menunjukkan komponen kesalahan (error term)

Interpretasi Hasil Regresi

1. Nilai konstanta sebesar 78.90350 menunjukkan bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Indeks Pembangunan pada Manusia (IPM) di kota Bandar Lampung diperkirakan sebesar 78.90350.

2. Koefisien regresi PAD sebesar -0.004587 menunjukkan bahwa apabila variabel lain dianggap konstan, maka setiap kenaikan PAD sebesar 1 satuan akan menurunkan nilai IPM sebesar 0.004587 poin. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam periode penelitian, PAD memiliki hubungan negatif terhadap IPM. Secara teoritis, peningkatan PAD seharusnya dapat mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia karena memperbesar kemampuan keuangan daerah. Namun, dalam penelitian ini hubungan yang terbentuk justru negatif. Hal tersebut dapat terjadi karena peningkatan PAD belum tentu langsung dialokasikan secara efektif pada sektor-sektor yang mendukung pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
3. Koefisien regresi Belanja Modal (BM) sebesar 0,001951 menunjukkan bahwa, dengan asumsi variabel lain berada dalam kondisi tetap, setiap peningkatan Belanja Modal sebesar 1 satuan akan diikuti oleh kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,001951 poin. Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan yang searah antara Belanja Modal dan IPM. Dengan kata lain, peningkatan alokasi anggaran pemerintah daerah pada belanja modal cenderung berkontribusi terhadap perbaikan kualitas pembangunan manusia. Kondisi tersebut selaras dengan pandangan teoretis yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi modal, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, serta berbagai layanan publik lainnya, dapat memperkuat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai t-hitung sebesar -0,634201 dengan nilai probabilitas 0,5908. Oleh karena nilai probabilitas tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05, dapat dinyatakan bahwa secara parsial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bandar Lampung.

Di sisi lain, variabel Belanja Modal memperoleh nilai t-hitung sebesar 0,505000 dengan nilai probabilitas 0,6637. Karena nilai probabilitas tersebut juga melebihi 0,05, maka secara parsial Belanja Modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Kota Bandar Lampung.

Dengan demikian, hasil uji t menunjukkan bahwa selama periode penelitian 2020–

2024, baik PAD maupun Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Uji Simultan (Uji F)

Pada uji ini mengahasilkan nilai F-stastitik sebesar 0,214840 dan nilai Prob(F-statistic) tercatat sebesar 0.823153. Karena nilai probabilitas melebihi 0,05, dapat disimpulkan bahwa PAD dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan secara bersamaan terhadap IPM di Kota Bandar Lampung, Hasil ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kedua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini belum mampu menjelaskan perubahan IPM secara signifikan selama periode 2020–2024.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,176847 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki tingkat kemampuan tertentu dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. dan Belanja Modal dalam menjelaskan variasi IPM di Kota Bandar Lampung adalah sebesar 17,68%, sedangkan sisanya sebesar 82,32% dijelaskan oleh variabel lain di luar kajian ini yang tidak disertakan dalam analisis.

Nilai Adjusted R-squared sebesar -0.646307 menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memiliki kemampuan penjelasan yang sangat rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah observasi yang sangat terbatas, yaitu hanya 5 tahun pengamatan, sehingga hasil regresi belum mampu memberikan gambaran hubungan yang kuat antarvariabel.

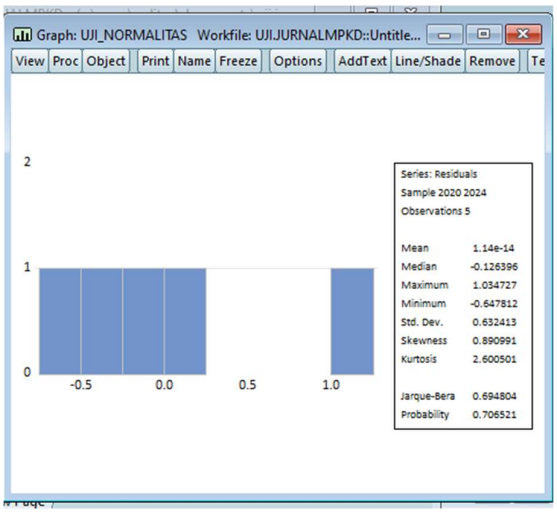
Uji Normalitas

Dalam uji normalitas, pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan nilai Jarque-Bera dan Probability. Pada umumnya, penelitian di bidang ekonomi dan bisnis menggunakan taraf signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$ atau 5%. Apabila nilai Probability lebih kecil daripada α, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai Probability lebih besar daripada α, maka data dapat dinyatakan berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi EViews, diperoleh nilai Jarque-Bera sebesar 0,694804 dan nilai Probability sebesar 0,706521.

Karena nilai Probability tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05 (0,706521 > 0,05), Maka dapat disimpulkan bahwa sisa data atau selisih data dalam analisis tersebut menunjukkan penyimpangan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan akurasi model secara keseluruhan pada penelitian ini berdistribusi normal.

Gambar 3 Uji Normalitas



Berdasarkan gambar tersebut, diketahui bahwa nilai mean residual sebesar 1,14E-14, standar deviasi sebesar 0,632413, dan skewness sebesar 0,890991. Nilai mean residual yang sangat mendekati nol mengindikasikan bahwa residual terdistribusi secara relatif seimbang. Walaupun nilai skewness tidak sama persis dengan nol, angka tersebut masih menunjukkan bahwa distribusi residual tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal. Di samping itu, nilai kurtosis sebesar 2,600501 yang mendekati angka 3 semakin mendukung bahwa distribusi residual masih dapat dikategorikan normal.

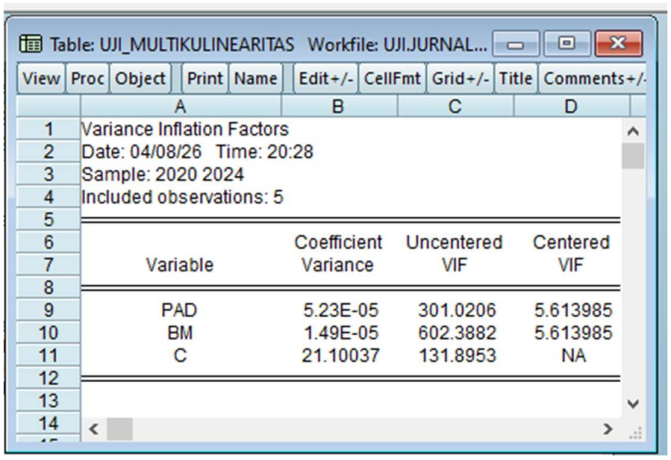
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, data yang digunakan dinilai memadai untuk dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya, seperti pengujian regresi dan uji hipotesis.

Uji Multikolinearitas

Penelitian ini dilakukan guna memunculkan keberadaan pada keterkaitan yang

erat variabel atau korelasi yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala multikolinearitas adalah dengan mengamati nilai Variance Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Centered VIF kurang dari 10. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan aplikasi EViews, diketahui bahwa nilai Centered VIF pada variabel PAD sebesar 5,613985 dan pada variabel Belanja Modal (BM) juga sebesar 5,613985. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai Centered VIF lebih dari 10

Gambar 4 Uji Multikolinearitas



Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini model regresi tidak memiliki masalah multikolinearitas. Hal ini mengindikasikan bahwa di antara variabel independen dalam model regresi tidak terdapat hubungan yang sangat kuat, sehingga setiap variabel tetap dapat menerangkan pengaruhnya terhadap variabel dependen dengan baik.

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut juga dapat dilihat bahwa nilai Uncentered VIF untuk variabel PAD sebesar 301.0206 dan variabel BM sebesar 602.3882. Namun, dalam pengujian multikolinearitas yang menjadi acuan utama adalah nilai Centered VIF, sehingga interpretasi model tetap didasarkan pada nilai tersebut. Karena seluruh nilai Centered VIF jika nilai tersebut kurang dari 10 model regresi dinyatakan lulus pengujian multikolineritas dan layak untuk diteruskan pada pengujian berikutnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini diterapkan untuk mendeteksi keberadaan variasi ketidak seragaman pada pelanggaran terhadap asumsi klasik dalam model regresi. Heteroskedastisitas adalah keadaan ketika varians residual tidak sama pada setiap pengamatan dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya memiliki varians residual yang konstan sehingga tidak menunjukkan gejala heteroskedastisita.

Uji heteroskedastisitas dalam studi ini dilakukan melalui metode White Test dengan menganalisis nilai Probability (Prob.) dari Obs*R-squared. Apabila nilai Prob < 0,05, maka terdapat indikasi terjadinya heteroskedastisitas dalam model penelitian. Sebaliknya, bila nilai jika nilai probabiliti lebih besar daro 0,05 berarti tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas pada model ini.

Gambar 5 Uji Heteroskedastisitas

2	Null hypothesis: Homoskedasticity			
3				
4	F-statistic	0.606274	Prob. F(2,2)	0.622
5	Obs*R-squared	1.887207	Prob. Chi-Square(2)	0.389
6	Scaled explained SS	0.241638	Prob. Chi-Square(2)	0.886
7				

Berdasarkan ilustrasi tersebut, hasil pengujian data dengan menggunakan aplikasi EViews menunjukkan bahwa nilai ObsR-squared sebesar 1,887207 dengan Prob. Chi-Square sebesar 0,389. Nilai probabilitas tersebut lebih besar daripada tingkat signifikansi α = 0,05, sehingga H0 diterima. Selain dari pada itu nilai probabiliti mencapai 0,622 ini juga berada di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa data regresi ini tidak menghadapi permasalahan heteroskedastisitas.

Selanjutnya, nilai Prob. Chi-Square terhadap jumlah persebaran variasi yang dijelaskan setelah penyesuaian skala 0,886 juga melebihi 0,05. Hasil ini semakin memperkuat bahwa varians residual pada model regresi bersifat relatif konstan atau stabil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu, asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi, sehingga model regresi tersebut bisa untuk ke tahap analisis seterusnya.

Uji Autokorelasi

Uji ini dialakukan untuk mendekteksi adanya korelasi diri pada data deret waktu

ada atau tidaknya hubungan timbal balik antara sisa penyimpangan pada satu rentang waktu tertentu dengan residual pada periode sebelumnya dalam suatu model regresi. Autokorelasi umumnya dijumpai pada runtun waktu yang seharusnya tidak mengandung gejala autokorelasi.

Dalam penelitian ini, pendeteksian autokorelasi dapat dilakukan menggunakan metode Breusch-Godfrey dalam bentuk Lagrange Multiplier guna adanya korelasi serial. Dasar pengambilan keputusan ditentukan berdasarkan nilai Prob. Chi-Square (Obs*R-squared). Apabila nilai Prob. < α (0,05), maka model regresi dinyatakan mengandung gejala autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai Prob. > α (0,05) maka hasil ini regresi dinyatakan sebagai Data tersebut bebas dari pola hubungan internal antar titik waktu, sehingga hasil analisisnya akurat dan tidak bias.

Gambar 6 Uji Autokorelasi

3				
4	F-statistic	0.143243	Prob. F(1,1)	0.769
5	Obs*R-squared	0.626475	Prob. Chi-Square(1)	0.428
6				

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan aplikasi EViews, didapatkan nilai Obs*R-squared mencapai sebesar 0.626475 dengan nilai Prob. Chi-Square sebesar 0.428. Nilai probability Peningkatannya lebih tinggi daripada tingkat kepentingan statistik yang ditetapkan α = 0,05 (0.428 > 0.05). Selain itu, nilai Prob. F-statistic sebesar 0.769 juga lebih besar dari 0,05, sehingga memperkuat pendekatan regresi ini di anggap gagal karna tidak menagkap hubungan antar variabel sepeti mengahadapi gangguan kolerasi sendiri.

Oleh karena itu, dapat di rangkum bahwa model regresi pada penelitian ini belum sesuai atau tidak akurat menunjukkan adanya gejala autokorelasi. Hal tersebut mengindikasikan sisa dari model ini bersifat saling bebas, sehingga model ini yang digunakan sudah salah memenuhi satu pentunjuk pokok pada teori kalsik dalam analisis regresi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki kofisien negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Belanja Modal (BM) berkoefisien positif tetapi juga tidak signifikan. Secara simultan, PAD dan BM juga tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM Kota Bandar Lampung periode 2020–2024. Temuan ini perlu dibaca secara hati-hati karena secara

teoritis IPM adalah ukuran pembangunan manusia yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan,serta kesejahteraan hidup, sehingga perubahan IPM tidak selalu merespons secara cepat terhadap perubahan fiskal jangka pendek. Selain itu, dengan jumlah observasi yang hanya lima tahun, kemampuan model untuk menangkap pola hubungan struktural juga menjadi terbatas.(Sagar & Najam, 1998) (Jin & Jakovljevic, 2023)

Koefisien PAD yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa kenaikan PAD pada periode penelitian tidak secara otomatis diikuti kenaikan IPM. Secara konseptual, peningkatan penerimaan pemerintah baru akan berdampak pada pembangunan manusia bila pendapatan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pembiayaan layanan dasar dan investasi sosial yang efektif. Bukti lintas negara menunjukkan bahwa kenaikan government revenue cenderung meningkatkan partisipasi sekolah dan menurunkan kematian ibu-anak, tetapi besarnya dampak sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan efektivitas penggunaan dana. Dengan kata lain, PAD yang meningkat belum tentu langsung menaikkan IPM bila alokasi dan implementasinya belum optimal.(S. G. Hall & O'Hare, 2024) (S. Hall et al., 2021)

Tidak signifikannya pengaruh PAD juga dapat dijelaskan dari sisi kapasitas pemungutan dan kualitas institusi daerah. Studi tentang mobilisasi pendapatan lokal di Ghana menunjukkan bahwa hasil penerimaan wilayah sangat dipengaruhi oleh mutu sumber daya manusia, inovasi administrasi, dan kemampuan institusional pemerintah lokal. Artinya, kekuatan fiskal daerah bukan hanya soal besar kecilnya angka penerimaan, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah mengelola aparatur, sistem, dan strategi pemungutan. Dalam konteks Bandar Lampung, temuan PAD yang tidak signifikan bisa dibaca sebagai indikasi bahwa PAD belum sepenuhnya menjadi instrumen yang langsung menggerakkan outcome pembangunan manusia selama periode penelitian.(Mahama et al., 2024) (Susilo et al., 2025)

Sementara itu, Belanja Modal yang berkoefisien positif menunjukkan arah hubungan yang sejalan dengan teori, yaitu semakin besar investasi pemerintah pada aset dan infrastruktur publik, semakin besar peluang peningkatan kualitas hidup masyarakat. Literatur internasional menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada sektor sosial, terutama kesehatan dan pendidikan, cenderung memperbaiki capaian pembangunan manusia dan dimensinya. Di samping itu, transfer fiskal yang bersifat publik juga dapat meningkatkan capaian pendidikan dan akumulasi modal manusia bila diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, arah positif BM dalam

penelitian ini masih konsisten dengan teori, walaupun secara statistik belum signifikan.(Roca-Sagalés & Muinelo-Gallo, 2023) (Acuna et al., 2023)

Meski demikian, tidak signifikannya Belanja Modal menandakan bahwa besarnya anggaran investasi belum tentu langsung menghasilkan peningkatan IPM. Penelitian tentang efisiensi belanja pemerintah menunjukkan bahwa pengeluaran publik bisa gagal meningkatkan pembangunan manusia apabila komposisinya lebih berat pada output fisik daripada output sosial, atau bila belanja tersebut belum efisien. Pada negara-negara G7, misalnya, belanja modal pemerintah ditemukan lebih kuat mendorong output fisik dibanding capaian sosioekonomi seperti HDI. Penelitian lain juga memperlihatkan bahwa efisiensi belanja pendidikan, kesehatan, dan transfer sangat menentukan posisi suatu negara terhadap frontier pembangunan manusia. Karena itu, dalam kasus Bandar Lampung, belanja modal yang positif tetapi tidak signifikan dapat diartikan bahwa manfaatnya terhadap IPM mungkin ada, namun belum cukup besar, belum tepat sasaran, atau belum terlihat dalam horizon waktu yang pendek. (Alhayek et al., 2022) (Prasetyo & Zuhdi, 2013)

Penemuan ini juga berjalan dengan literatur yang menekan pada pentingnya kualitas belanja, bukan sekadar besarnya belanja. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas belanja daerah berkaitan dengan penurunan kemiskinan dan perbaikan IPM, sementara studi lintas negara menunjukkan bahwa belanja sosial publik dapat menurunkan kehilangan pembangunan manusia akibat ketimpangan. Artinya, jika belanja daerah masih lebih dominan pada sisi administratif, proyek fisik yang tidak langsung menyentuh layanan dasar, atau serapan yang belum efektif, maka pengaruhnya terhadap IPM dapat menjadi lemah. Dengan demikian, hasil penelitian Anda memperkuat pandangan bahwa yang menentukan bukan hanya nominal BM, tetapi juga mutu alokasi, timing, dan efektivitas implementasinya.(Masduki et al., 2022) (Miranda-Lescano et al., 2024)

Hasil uji simultan yang menunjukkan PAD dan BM tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM juga memiliki dukungan dalam literatur empiris. Penelitian di Nigeria menemukan bahwa pengeluaran sektoral pemerintah tidak menunjukkan hubungan yang kuat dengan pembangunan manusia dalam model utama mereka, meskipun ada indikasi pengaruh dalam horizon tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan fiskal-pembangunan manusia bisa bersifat tidak langsung, tertunda, dan dipengaruhi banyak faktor lain seperti kemiskinan, pengangguran, kualitas institusi, serta struktur belanja.

Dengan kata lain, tidak signifikannya PAD dan BM dalam model Anda tidak selalu berarti keduanya tidak penting, tetapi bisa berarti bahwa pengaruhnya bekerja melalui jalur lain yang tidak tertangkap oleh model sederhana dengan observasi yang sangat terbatas. (Onabote et al., 2023) (Haile & Niño-Zarazúa, 2018)

Pembahasan ini juga mengarah pada kemungkinan adanya masalah efisiensi dan tata kelola. Literatur menunjukkan bahwa kenaikan belanja publik tidak otomatis meningkatkan outcome pendidikan apabila kebocoran, absensi aparatur, atau lemahnya pengawasan tetap tinggi. Penelitian di India bahkan menunjukkan bahwa mengurangi inefisiensi tata kelola dapat memberi hasil yang lebih besar daripada sekadar menambah input belanja. Perspektif ini relevan untuk menjelaskan mengapa PAD dan BM di Bandar Lampung belum terbukti signifikan terhadap IPM: bisa saja persoalannya bukan pada ketersediaan dana semata, tetapi pada kapasitas manajerial, kualitas birokrasi, dan efektivitas eksekusi program pembangunan manusia. (Muralidharan et al., 2017) (S. G. Hall & O'Hare, 2024)

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM Kota Bandar Lampung periode 2020–2024 tampaknya lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar PAD dan BM dalam model, atau dipengaruhi oleh mekanisme fiskal yang lebih kompleks daripada yang dapat ditangkap oleh regresi sederhana lima observasi. Temuan ini sejalan dengan studi tentang desentralisasi fiskal yang menemukan hubungan tidak selalu linear terhadap HDI, serta studi konvergensi IPM di Indonesia yang menunjukkan bahwa komponen fiskal tertentu signifikan, sementara komponen lain tidak. Oleh karena itu, hasil penelitian Anda lebih tepat ditafsirkan sebagai bukti bahwa PAD dan BM belum terbukti signifikan secara statistik terhadap IPM Bandar Lampung pada periode penelitian, bukan sebagai bukti bahwa keduanya sama sekali tidak relevan dalam pembangunan manusia. (Jin & Jakovljevic, 2023) (Susilo et al., 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengkajian data serta deskripsi yang telah disajikan, dapat dirangkum bahwa Kontribusi Pendapatan Asli Daerah tercermin dari koefisien regresi yang bernilai -0,004587 dengan nilai signifikansi 0,5908. Nilai tersebut menunjukkan bahwasanya secara parsial PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandar Lampung selama periode 2020–2024. Temuan ini mengindikasikan bahwa kenaikan PAD pada kurun waktu penelitian belum cukup untuk memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan IPM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa besarnya PAD tidak serta-merta berkontribusi langsung terhadap pembangunan manusia apabila pemanfaatannya belum diarahkan secara optimal pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, variabel Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar 0,001951 dengan nilai signifikansi 0,6637. Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Modal juga tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM Kota Bandar Lampung pada tahun 2020–2024. Meskipun koefisien regresi menunjukkan Hubungan tersebut bersifat positif, namun pengaruhnya masih terlalu lemah untuk menimbulkan dampak signifikan terhadap pembangunan manusia selama periode penelitian. Hal ini dapat disebabkan oleh karakteristik belanja modal yang umumnya memberikan manfaat dalam jangka menengah maupun jangka panjang, sehingga pengaruhnya belum terlihat secara optimal dalam periode penelitian yang relatif singkat.

Dari hasil uji simultan, diperoleh nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,823153. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa PAD dan Investasi Aset Tetap secara Serentak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM Kota Bandar Lampung pada periode 2020–2024. Oleh karena itu, dugaan yang mengemukakan bahwa PAD dan belanja ini juga berpengaruh terhadap IPM tidak bisa diterima. Hasil ini menandakan bahwa perubahan IPM selama periode penelitian cenderung lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai elemen eksternal di luar kerangka penelitian, seperti. belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan, peningkatan sektor, serta kebijakan sosial yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Nilai R-squared sebesar 0,176847 menampilakan surplus angggaran yang mampu menguraikan perbedaan IPM sebesar 17,68%, sementara yang lain yaitu 82,32%, didorong oleh indikator yang lain dan tidak dimasukkan dalam penelitian tersebut. Temuan tersebut memperlihatkan suatau penelitian yang memiliki peran yang relatif rendah. Selain itu, jumlah observasi yang terbatas, yaitu hanya mencakup lima tahun pengamatan, juga menjadi salah satu keterbatasan utama penelitian. Dengan begitu hasil analisis statistik dalam penelitian ini perlu diinterpretasikan dengan cermat atau hati-hati.

Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa PAD memiliki arah hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan Modal belanja berhubungan secara positif dengan namun pengaruhnya tidak signifikan. IPM, Kita dapat melakukan peningkatan ini secara bertahap atau serentak. Oleh karena itu, perbaikan kualitas akan tercapai dengan lebih efektif. pembangunan manusia di Kota Bandar Lampung tidak cukup hanya dilihat dari besarnya PAD dan Belanja Modal, tetapi juga perlu mempertimbangkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah, kualitas kebijakan publik, serta prioritas pembangunan yang benar-benar berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

REFERENSI

Acuna, J., Balza, L. H., & Gomez-Parra, N. (2023). From wells to wealth? Government transfers and human capital. *Journal of Development Economics*, *165*, 103206. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2023.103206

Alhayek, M. N., Kalloub, M. A., & Alwaked, A. A. (2022). Do Government Expenditures in G7 Countries Target Socioeconomics or Physical Output? *Economies*, *10*(10), 262. https://doi.org/10.3390/economies10100262

Badan Pusat Statistik. (2015). *Booklet Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru*.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2016--2020*.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Komponen (LF2020)*.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2024a). *Indeks Pembangunan Manusia*.

Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2024b). *Statistik Daerah Kota Bandar Lampung 2024*. BPS Kota Bandar Lampung. https://bandarlampungkota.bps.go.id/id/publication/2024/12/30/ada5cd2e7834a4930907dc92/statistik-daerah-kota-bandar-lampung-2024.html

Haile, F., & Niño-Zarazúa, M. (2018). Does Social Spending Improve Welfare in Low-income and Middle-income Countries? *Journal of International Development*, *30*(3), 367–398. https://doi.org/10.1002/jid.3326

Hall, S. G., & O'Hare, B. A. M. (2024). A model of the impact of government revenue and

quality of governance on schooling. *International Journal of Educational Development*, *108*, 103055. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.103055

Hall, S., Illian, J., Makuta, I., McNabb, K., Murray, S., O'Hare, B. A. M., Python, A., Zaidi, S. H. A., & Bar-Zeev, N. (2021). Government Revenue and Child and Maternal Mortality. *Open Economies Review*, *32*, 213–229. https://doi.org/10.1007/s11079-020-09597-0

Jin, H., & Jakovljevic, M. (2023). Fiscal Decentralization and the Human Development Index: A Cross-Border Empirical Study. *Sustainability*, *15*(11), 8784. https://doi.org/10.3390/su15118784

Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (n.d.). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*.

Karpi, I. K., Widayat, Y. Y., Ratnasari, N. E., & Munajat, M. D. E. (2022). Can Regional Spending Management Policies Improve Human Development Index? *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, *3*(2), 177–191. https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i2.309

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Mahama, P. Y., Abdulai, A.-G., & Asamoah, K. (2024). Local revenue mobilisation in Ghana: Why similar metropolitan and municipal assemblies exhibit different outcomes. *Social Sciences \& Humanities Open*, *9*, 100853. https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.100853

Masduki, U., Rindayati, W., & Mulatsih, S. (2022). How Can Quality Regional Spending Reduce Poverty and Improve Human Development Index? *Journal of Asian Economics*, *82*, 101515. https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101515

Maulani, A. N., Rusdarti, & Wahyudin, A. (n.d.). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Belanja Publik terhadap Kemiskinan dengan IPM sebagai Variabel Moderasi. *Business and Economic Analysis Journal*.

Miranda-Lescano, R., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2024). Human Development and Inequalities: The Importance of Social Public Spending. *Structural Change and Economic Dynamics*, *69*, 363–377. https://doi.org/10.1016/j.strueco.2023.12.008

Mirza, D. S. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap IPM di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*.

Mukherjee, S., & Badola, S. (2021). Public Financing of Human Development in India: A Review. *Indian Journal of Human Development*, *15*(1), 62–81. https://doi.org/10.1177/09737030211005043

Muralidharan, K., Das, J., Holla, A., & Mohpal, A. (2017). The Fiscal Cost of Weak Governance: Evidence from Teacher Absence in India. *Journal of Public Economics*, *145*, 116–135. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2016.11.005

Onabote, A. A., Ohwofasa, B. O., & Ogunjumo, R. A. (2023). Government Sectoral Spending and Human Development in Nigeria: Is There a Link? *Heliyon*, *9*(7), e17545. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17545

Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2024). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 (Audited)*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020--2024*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/135877/perpres-no-18-tahun-2020

PPID Kota Bandar Lampung. (n.d.). *Profil Kota Bandar Lampung*.

Prasetyo, A. D., & Zuhdi, U. (2013). The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development. *Procedia Economics and Finance*, *5*, 615–622. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(13)00072-5

Purohit, B. C. (2012). Budgetary Expenditure on Health and Human Development in India. *International Journal of Population Research*, *2012*, 1–9. https://doi.org/10.1155/2012/914808

Roca-Sagalés, O., & Muinelo-Gallo, L. (2023). Human Development and Decentralization: The Importance of Public Health Expenditure. *Annals of Public and Cooperative Economics*, *94*(1), 191–219. https://doi.org/10.1111/apce.12373

Sagar, A. D., & Najam, A. (1998). The Human Development Index: A Critical Review. *Ecological Economics*, *25*(3), 249–264. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(97)00168-7

Setiawan, G. B. K. P., & Budiana, D. N. (2015). Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel

Intervening Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*.

Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, *4*(1), 97–112.

Susilo, Prasetyia, F., Wicesa, N. A., & Finuliyah, F. (2025). The Impact of Fiscal Decentralization on Human Development Index Convergence in Indonesia: An Arellano-Bond GMM Dynamic Panel Data Estimation. *Forum for Social Economics*. https://doi.org/10.1080/07360932.2025.2610937

Universitas Pendidikan Ganesha. (n.d.-a). Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Artikel Ilmiah*.

Universitas Pendidikan Ganesha. (n.d.-b). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia melalui Alokasi Belanja Modal. *Artikel Ilmiah*.

Yanto, E., Ridwan, & Fattah, V. (n.d.). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Survei pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*.